

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Proses terjadinya kontroversi kebijakan sangat erat adanya hubungan kekuasaan dan kepentingan terwakili, inkonsistensi dan keberpihakan, tentu membawa keterdampakan dan menimbulkan gejala di tengah masyarakat. Kontroversi kebijakan didefinisikan pada perdebatan publik yang serius dan perbedaan pendapat yang tajam mengenai suatu dampak kebijakan pemerintah. Idealnya Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang pemanfaatan hasil sedimentasi laut dibuat untuk meningkatkan ekosistem pantai dan laut, mengurangi pendangkalan, serta meremajakan terumbu karang dan lain-lain. Namun, peraturan ini mendapat reaksi negatif dari masyarakat dan LSM, yang menganggapnya berpotensi merusak lingkungan dan menyalahgunakan sumber daya pasir laut untuk kepentingan segelintir kelompok. Di sisi lain, ada kebingungan dalam memahami status sumber daya yang diambil, apakah itu lumpur atau pasir laut, yang menyebabkan kebingungan di tengah pemahaman masyarakat.

Adanya perbedaan pandangan antara Dinas Kelautan dan Dinas ESDM, yang menunjukkan adanya miskomunikasi yang memungkinkan adanya dampak domino. Penulis mengidentifikasi beberapa bentuk kontroversi, termasuk potensi kesulitan dalam implementasi. Masyarakat Desa Morodemak terbagi dalam dua pandangan yakni ada yang mendukung pengerukan untuk membuka jalur pelayaran namun dengan syarat hasilnya digunakan untuk desa mereka. Sebaliknya, ada yang menolak karena khawatir akan dampak negatif terhadap lingkungan dan dampak

lainnya jika pasir dijual atau digunakan di luar desa. Kurangnya pemahaman tentang kebijakan dan faktor komunikasi antara pemerintah dan masyarakat turut menyumbang pada ketidakpastian ini.

Kontroversi kebijakan ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya koordinasi antara lembaga pemerintah, ketidakjelasan keputusan yang diambil para pemangku kebijakan, dan konflik kepentingan. Pemerintah berusaha menjelaskan bahwa kebijakan ini untuk kesejahteraan masyarakat. Namun, masyarakat meragukan tujuan dan dampak kebijakan tersebut. Ada pula keinginan masyarakat untuk berpartisipasi dan menyampaikan kekhawatiran mereka, tetapi merasa diabaikan. Analisis ini menunjukkan bahwa kebijakan PP Nomor 26 Tahun 2023 dapat memicu perlawanan dari masyarakat jika tidak dikomunikasikan dengan baik. Keterlibatan semua pihak, termasuk masyarakat, dalam proses pengambilan keputusan sangat penting untuk mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan kepercayaan.

Pada dasarnya Kementerian Kelautan dan Perikanan harus menyusun aturan lebih jelas dan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan untuk meminimalisir kontroversi yang berkembang di tengah masyarakat. Dua NGO, KIARA dan WALHI, memainkan peran khusus dalam mengadvokasi kepentingan masyarakat pesisir, mendorong partisipasi dalam proses keputusan terkait PP 26/2023. Mereka melakukan penelitian tentang dampak sosial dan lingkungan dari kebijakan ini dan memiliki jaringan luas untuk mobilisasi aksi bersama. Tujuannya adalah mendesak pemerintah untuk mencabut kebijakan tersebut karena potensi dampak negatif terhadap ekosistem dan mata pencaharian nelayan.

Pada dampak ekonomi, warga Desa Morodemak mengatakan bahwa pengerukan pasir laut memiliki dampak positif dan negatif, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Meskipun saat ini membawa manfaat ekonomi, hal itu juga menyebabkan fenomena negatif yang kompleks dan persisten bagi ekonomi lokal. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa warga khawatir tentang menurunnya produktivitas tangkapan ikan. Dampak yang paling utama adalah kerusakan ekosistem laut akibat pengendapan sedimen, merusak terumbu karang, padang lamun, dan habitat laut lainnya yang bergantung pada ikan untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Dampak lainnya termasuk pencemaran laut akibat sedimen yang terangkat selama pengerukan, yang dapat mencemari air laut, mengganggu ekosistem, dan mengurangi populasi ikan.

Sebaliknya, manfaat pencegahan sedimentasi pantai juga disoroti. Menurut data, pengerukan pasir dapat secara efektif mengurangi penumpukan sedimen di pantai. Minat utama masyarakat adalah meningkatkan navigasi dan mengurangi sedimentasi. Masyarakat juga meminta infrastruktur pendukung untuk kapal penangkap ikan, seperti pasar atau tempat lelang ikan. Bukti data menggambarkan bahwa masyarakat memahami kebutuhan mereka dan ingin menyampaikan preferensi mereka kepada pembuat kebijakan. Masyarakat meminta agar kebijakan semacam itu seharusnya benar-benar menguntungkan nelayan lokal, meningkatkan efektivitas dan efisiensi.

Konflik yang akan terjadi di antara masyarakat dapat mengganggu ketertiban umum dan menghambat pembangunan lokal. Beberapa masyarakat yang menentang kebijakan tersebut, menyatakan kesiapan untuk menentang jika

ekstraksi pasir dieksploitasi di tempat lain. Mereka menyoroti kondisi Morodemak yang mengkhawatirkan, dengan banjir harian mengancam rumah-rumah. Kekhawatiran ini resonan dengan banyak warga setempat yang merasa bahwa pemanfaatan pasir laut hanya menguntungkan pemerintah atau bisnis, meninggalkan komunitas dalam keadaan rentan.

Kekhawatiran utama adalah potensi kenaikan permukaan air laut dan penurunan permukaan tanah yang menyebabkan rumah mereka tidak layak huni. Masyarakat tidak yakin akan dampak akhir dari kebijakan pemerintah tersebut, sehingga memicu perbedaan pandangan di antara mereka. Kelompok masyarakat yang menentangnya bersikeras bahwa pasir yang dikeruk tidak boleh memberikan manfaat bagi pihak luar, karena mereka memerlukan bantuan untuk mencegah rumah mereka dari banjir.

Masyarakat khawatir bahwa kebijakan tersebut mungkin akan memprioritaskan keuntungan pemerintah dibandingkan dengan mengorbankan mereka. Mereka percaya bahwa kesejahteraan mereka harus diutamakan, dan mereka menganjurkan restorasi hutan bakau dan pembangunan pemecah gelombang atau tindakan lain untuk melindungi rumah mereka. Mereka juga mendukung pengembangan pesisir untuk pariwisata guna menghasilkan manfaat ekonomi bagi mereka. Namun, ketidakpastian yang meluas membuat mereka skeptis terhadap tindakan pemerintah.

Meskipun proses pengerukan mungkin menimbulkan dampak ekologis yang negatif, penjelasan pemerintah menunjukkan bahwa pembuangan sedimen terutama berdampak pada organisme permukaan dibandingkan kehidupan laut dalam.

Namun, analisis lingkungan seringkali menunjukkan bahwa dampak negatif dari kegiatan tersebut jauh lebih besar daripada potensi manfaatnya. Penting untuk memperjelas bagaimana sedimen akan dimanfaatkan dan manfaat yang dihasilkannya bagi masyarakat.

5.2 Saran

Berdasarkan temuan penelitian tentang kontroversi kebijakan dengan studi kasus pengerukan pasir laut berdasarkan PP Nomor 26 Tahun 2023 di Desa Morodemak khususnya menilik bagaimana proses kontroversi kebijakan, *power relation*, *interest* serta keterdampakan yang dirasakan oleh masyarakat Desa Morodemak terdapat beberapa kelemahan dan perlu perbaikan. *Pertama*, meskipun isu penolakan tambang pasir sudah tidak ramai diperbincangkan di sosial media, namun gerakan masyarakat yang menolak dapat timbul kapan saja. Ketika implementasi pengerukan pasir laut tidak sesuai dengan prosedur dan malah membuat pencemaran air laut maka gerakan masyarakat akan timbul ke permukaan. Begitu juga ketika pemanfaatan pasir laut yang tidak sesuai dengan hasil sosialisasi yang ingin digunakan untuk *recovery* lahan mangrove, masyarakat akan melawan bahkan bisa lebih masif dari sebelumnya. *Kedua*, implementasi pengerukan yang masih menggunakan eskavator membuat dampak yang dijanjikan oleh pemerintah terasa lama dalam kebermanfaatannya. Akibatnya masyarakat rob masih terus terjadi setiap hari. *Ketiga*, upaya masyarakat dalam mengadvokasikan penolakan belum begitu merata, gerakan masyarakat menolak belum sepenuhnya ada, masih hanya aksi-aksi golongan yang menyuarakan penolakan. *Keempat*, sumber daya

manusia atau masyarakat yang belum memiliki pengetahuan dalam menjangkau informasi membuat potensi konflik dan persuasif kelompok kepentingan sangat besar. Berangkat dari kelemahan yang ditemukan pada penelitian ini, maka terdapat beberapa saran yang dapat diberikan sebagai pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.

Pertama, saran untuk penelitian selanjutnya adalah melakukan penelitian yang menilai keterdampakan pengerukan pasir laut dalam kurun waktu 2 tahun setelah implementasinya. Hal ini dapat menjadi acuan keterdampakan dari pemanfaatan sumber daya alam dan menilai efektivitas pemanfaatan pasir laut untuk ekologi. Selain itu, penting untuk melibatkan peneliti yang berasal dari disiplin ilmu lainnya seperti ilmu kelautan, tata kelola pesisir, teknik geologi dan sebagainya. Hal ini menunjang kolaborasi analisis yang dapat memberikan penilaian efektivitas yang akurat.

Kedua, upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia perlu ditingkatkan agar masyarakat tahu peran dan tahu apa yang harus dilakukan ketika dampak kebijakan mengarah pada dampak buruk. Penelitian selanjutnya perlu menjawab bagaimana cara meningkatkan pengetahuan masyarakat dan cara masyarakat untuk menyatakan keinginannya. Pada dasarnya apatisisme masyarakat perlu dilunturkan supaya kebijakan tidak hanya menguntungkan segelintir kelompok dengan cara edukasi masyarakat.

Ketiga, analisis polarisasi akibat kontroversi kebijakan menghantui keadaan masyarakat perlu ditingkatkan, hal ini perlu untuk mengidentifikasi penyebab-penyebab polarisasi di tengah masyarakat. Perlu adanya penyelarasan konsepsi

antara pemerintah dan masyarakat agar masyarakat tidak miskonsepsi kebijakan yang ada. Hasil analisis dapat menjadi acuan pemerintah dalam membuat kebijakan supaya tidak menimbulkan gejolak di tengah masyarakat.

Keempat, meningkatkan kerjasama multi sektoral guna meminimalisir adanya penyimpangan dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kelompok tertentu. Kolaborasi dengan akademisi, nelayan, masyarakat penjual ikan, lembaga swadaya masyarakat, aparat penegak hukum, maupun komunitas masyarakat sangat diperlukan guna menyelaraskan maksud kebijakan dan keterbutuhan masyarakat. Dengan mengintegrasikan peran berbagai sektor, upaya untuk mencegah penyimpangan kebijakan dapat diminimalisir.

Penelitian ini telah menggambarkan bagaimana proses terjadinya kontroversi kebijakan dan aktor yang sedang mempresentasikan power relation dan interest serta keterdampakan masyarakat Morodemak. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan guna menyelaraskan kebutuhan lokal dan kebutuhan negara secara general. Hal ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi upaya gerakan penolakan yang berdampak pada hal lain seperti polarisasi, menurunnya tingkat kepercayaan terhadap pemerintah serta konflik fisik. Keterlibatan masyarakat dalam mengawal pelaksanaan pengerukan juga menjadi penting supaya proses pemanfaatan tidak hanya menguntungkan segelintir orang. Pada akhirnya apatisme masyarakat hanya akan membukakan peluang kelompok kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya alam melalui kebijakan-kebijakan ambigu.